



Buletin Parlementaria

Nomor 1003/III/IV/2018 • April 2018

DPR Sesalkan Bocornya Pipa Minyak Pertamina



**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**



FESTIVAL & DISKUSI
Kopi, Teh dan Cokelat
PRODUK PETANI INDONESIA



GEDUNG DPR RI
25 - 27 APRIL 2018

DPR Sesalkan Bocornya Pipa Minyak Pertamina



Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Gus Irawan Pasaribu meninjau langsung kebocoran pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan

Komisi VII DPR RI menyesalkan terjadinya kebocoran pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 31 Maret 2018 lalu. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, dampak atas kejadian itu bukan hanya kepada kehidupan biota laut ataupun flora fauna yang ada, tetapi telah menyebabkan jatuhnya korban manusia meninggal dunia.

“Oleh karena itulah, Komisi VII merasa penting untuk datang melihat langsung guna mengetahui permasalahannya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak, serta bagaimana bantuan kepada korban yang jatuh, baik meninggal

maupun kepada para nelayan yang tidak bisa melaut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tegas Gus Irawan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Balikpapan, Kaltim, Senin (9/4).

Hingga hari ketiga pasca kejadian, belum ada pihak yang merasa

bertanggungjawab atas musibah itu, lanjutnya. Oleh karena, itu Komisi VII perlu meninjau langsung untuk mengetahui solusi apa yang telah dilakukan Pertamina, karena sebelumnya pihak Pertamina sendiri membantah dengan menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan diakibatkan



foto:Agung/hr

terulang kembali di masa depan,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Ia juga menegaskan, semua yang terkait hukum harus diproses. Meski Komisi VII tidak ingin mencampuri proses hukum itu, tetapi Komisi VII ingin memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan, begitu pula dengan proses rehabilitasi yang terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyatakan, Pertamina harus menjamin masa depan keluarga korban meninggal dunia akibat bocornya pipa minyak Pertamina di Teluk Balikpapan itu.

“Keluarga korban tentu harus dijamin masa depannya. Pertamina adalah BUMN, dan negara menugaskan Pertamina untuk menjalankan tugas di bidang perminyakan dan energi. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, maka perhatian khusus kepada korban harus diprioritaskan dan diselesaikan,” tandas Herman.

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, bentuk perhatian Pertamina bukan hanya terhadap yang lima orang korban meninggal saja, tetapi kepada masyarakat lain yang juga ikut dirugikan. Karena disekitar area yang terdampak terdapat juga jaring dan kapal.

“Maka hal itu jangan dibiarkan, dan menghitungnya jangan terlalu lama. Seolah-olah ini mengulur-ulur waktu. Selesaikan segera dan jangan ditawar. Ini adalah persoalan rakyat, ini adalah hak pemilik negeri ini yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Menurut Herman, dalam waktu 6 jam, seharusnya sudah selesai. Area yang tercemar sudah diproteksi dan tidak bisa dilalui oleh siapapun. Caranya bisa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Angkatan Laut, dan pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan informasi bahwa ada pencemaran minyak yang berbahaya.

Senada dengan Herman, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu mengatakan bahwa ada waktu 6 sampai 7 jam untuk aliran minyak itu mengalir, kalau saja Pertamina segera bertindak memperingatkan rakyat untuk tidak melaut maka tidak akan ada korban jiwa. “Korban jiwa itu karena pembiaran dan kelalaian Pertamina yang tidak memperingatkan rakyat untuk tidak melaut ke tempat itu,” kata Adian. ■ as/sc

oleh bocornya pipa bawah laut milik Pertamina.

“Baru pada hari ke empat setelah kejadian, pengakuan itu ada. Saya membayangkan selama tiga hari sejak kejadian itu tidak melakukan apa-apa karena mereka tidak merasa bertanggungjawab. Kedatangan kita adalah untuk meninjau langsung kondisi di lapangan, sekaligus untuk mendiskusikan solusi terbaik terkait dengan kejadian ini, dan tidak boleh kejadian serupa ini



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto

ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom,
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias

FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,
Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, GERALDI OPIE

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Ketua DPR UU ITE Belum Atur Perlindungan Data Pribadi



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan GMNI di ruangan kerjanya

Foto: Jaka/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini berlaku belum bisa mengatur dan memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mendukung revisi UU ITE.

“Terkait dengan lebih dari satu juta data pribadi orang Indonesia di Facebook yang diambil, kita tentu tidak bisa apa-apa. Begitupun ketika data pribadi kita di bank dipergunakan, bahkan diperjualbelikan. Karena memang Undang-Undang ITE belum secara implisit memuat aturan itu. Oleh karena itu, saya mendukung agar revisi UU ITE segera dilakukan atau bisa dengan membuat undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi,” papar Bamsoet, begitu ia biasa disapa, ketika menerima kunjungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GMNI Robi juga mengutarakan akan dampak negatif dari perkembangan dunia digital khususnya media sosial yang dianggapnya bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa.

Menjawab hal itu, politisi Partai Golkar ini mengakui bahwa perkembangan teknologi sangat pesat dan tidak bisa dibendung lagi itu juga membawa dampak negatif. Namun itu bukan berarti kita harus menghindari dari sentuhan teknologi itu sendiri, melainkan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya untuk hal-hal positif, sehingga secara tidak langsung bisa meminimalisir dampak negatif yang ada.

“Perkembangan teknologi semakin pesat dan tidak terbendung lagi. Itu justru harus dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya untuk hal positif, sehingga secara tidak langsung bisa meminimalisir dampak negatif yang ada. Dengan kata lain, bagaimana merubah tantangan menjadi peluang. Peluang dalam berbisnis misalnya. Jika dulu kita mau bisnis butuh modal yang besar untuk menjual atau mempromosikannya, namun dengan media sosial, hanya tinggal di *upload* (dimasukan ke sosial media) banyak orang yang langsung tertarik, menawar dan membelinya,” pungkasnya.

■ ayu/sc

Perpres TKA Harus Digugat

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) harus digugat. Hal tersebut diungkapkannya menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya rencana dari organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia yang akan menggugat perpres tersebut.

“Ya, Perpres itu memang harus digugat oleh serikat pekerja. Karena lahan pekerjaan itu dibutuhkan oleh tenaga-tenaga kerja, buruh-buruh kita. Tidak boleh memberikan keleluasan kepada TKA. Kecuali mereka yang mempunyai *skill* yang tidak dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia. Tapi selama orang Indonesia memiliki keahlian itu, ya diberikanlah prioritas kepada tenaga kerja-tenaga kerja kita. Kita membutuhkan lapangan pekerjaan itu untuk Indonesia agar bisa bekerja di negara kita sendiri,” papar Fadli Zon di ruang kerjanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Sementara itu, baru-baru ini Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang mempermudah izin tenaga kerja asing sarat akan pelanggaran hukum. Ia menilai banyak poin yang bertentangan dengan aturan dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satunya, Pasal 10 Perpres TKA yang berbunyi bahwa persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak dibutuhkan bagi TKA pemegang saham, pegawai diplomatik, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Padahal, Pasal 43 UU Ketenagakerjaan menyebut pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan RPTKA.

Selain itu, Pasal 42 UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan setiap TKA memiliki izin tertulis dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Jadi, izin kerja TKA ini otomatis. Seharusnya,



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

foto:odjie/hr

aturan ini tidak boleh dilanggar oleh Perpres. Namun nyatanya, aturan ini muncul di dalam Perpres,” ungkap Timboel, baru-baru ini.

Tidak hanya RPTKA, Timboel juga menyoroti Pasal 22 Perpres yang diteken Presiden Joko Widodo. Pasal itu menyebut TKA bisa menggunakan jenis Visa Tinggal Sementara (Vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (Itas) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan kata lain, kini persetujuan TKA masuk ke Indonesia bisa melalui dua pintu, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. ■ ayu/sc

Kerja Sama Indonesia-Bahrain Diperkuat

Sudah 42 tahun hubungan Indonesia-Bahrain terjalin, Kedutaan Besar Bahrain juga sudah dibuka di Jakarta. Peluang kerja sama kedua negara sangat terbuka di berbagai sektor. Salah satu yang dialami adalah politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan pariwisata. Kerja sama kedua negara diperkuat kembali.

Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bertemu Parlemen Bahrain di Kota Manama, Bahrain, Senin (9/4). Kunjungan ini selain merupakan kunjungan balasan juga ingin merealisasikan kerja sama yang sempat disepakati kedua parlemen pada 2017 lalu. Ketika itu, Ketua Parlemen Bahrain Ahmed Bin Ibrahim Rashed Almulla menemui Ketua DPR Setya Novanto dan menandatangani kerja sama di berbagai sektor.

“Tahun ini kami senang setelah

42 tahun kedua negara membuka hubungan. Tahun 2018 Kedubes Bahrain di Jakarta telah dibuka. Kami datang ke Manama dengan semangat memperkuat hubungan,” kata Fahri Hamzah. Kerja sama di bidang industri, sektor jasa, tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan juga diperbincangkan. Ke depan, sebut Fahri, Indonesia dan Bahrain berencana bekerja sama dalam bidang pariwisata dan kebudayaan.

Selain melakukan pertemuan dengan Parlemen dan Majelis Syuro, delegasi akan bertemu Kementerian Industri

Kunjungan ini selain merupakan kunjungan balasan juga ingin merealisasikan kerja sama yang sempat disepakati kedua parlemen pada 2017 lalu. Ketika itu, Ketua Parlemen Bahrain Ahmed Bin Ibrahim Rashed Almulla menemui Ketua DPR Setya Novanto dan menandatangani kerja sama di berbagai sektor.

dan Pariwisata serta Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial. Turut hadir mendampingi Fahri Anggota DPR Pius Lustrilanang (F-Gerindra), Handayani Soehelly Qari (F-PKB), Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN), Ferdiansyah Nuzirwan Burhanuddin (F-Golkar), dan Reni Marlinawati (F-PPP).

■ mh/sc



Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama dengan Parlemen Bahrain

fotodok-bksap/hr



Foto Azka/hr

Pimpinan DPR RI menerima pandangan fraksi mengenai RUU SDA dari Anggota DPR RI Henky Kurniadi

Paripurna Setujui RUU SDA Menjadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis, dan disampaikan kepada pimpinan rapat.

Usai seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Fadli meminta kesepakatan untuk menyetujui RUU SDA sebagai usul inisiatif DPR. “Apakah RUU usul inisiatif Anggota DPR RI tentang Sumber Daya Air menjadi RUU usul DPR RI dapat disetujui?” tanya Fadli disambut persetujuan seluruh Anggota Dewan yang hadir di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, pembahasan akan dilanjutkan bersama perwakilan dari pemerintah, dimana Pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan Rapat Paripurna kali ini.

Seperti diketahui, sebelumnya MK membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, RUU SDA yang baru mengamankan negara harus berkuasa penuh terhadap sumber daya air.

Disamping itu, diberikan kesempatan untuk swasta dan badan usaha yang lain untuk mengelola air dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat atas air. Turut mendampingi Fadli memimpin jalannya Rapat Paripurna, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dan Taufik Kurniawan.

■ ann/sf



foto:Andri/hr

Pimpinan DPR RI menerima laporan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR dan DPD serta rumah jabatan anggota dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto

DPR Sahkan Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4), mengesahkan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.

Kawasan MPR, DPR dan DPD atau biasa disebut Kompleks Parlemen, dikategorikan sebagai obyek vital karena menyangkut kawasan negara yang bersifat strategis, sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto yang melaporkan Rancangan Peraturan tersebut menyebutkan, dalam Kompleks Parlemen ada tiga lembaga negara yaitu MPR, DPR dan DPD. Kompleks ini dihuni oleh kurang lebih

9.660 orang, belum termasuk tamu yang berkunjung setiap harinya. Di Kompleks Parlemen inilah berbagai kebijakan strategis dirumuskan dan diputuskan mulai pembentukan perundang-undangan, pengawasan serta evaluasi kerja pemerintah.

Aktivitas tersebut dilakukan oleh Anggota DPR dan DPD yang digolongkan sebagai pejabat negara, diantaranya aktivitas yang menghasilkan dokumen negara yang penting dan adakalanya dikategorikan rahasia, karena menyangkut keamanan negara.

Selain itu, aktivitas ketiga lembaga negara tersebut sering melibatkan tamu-tamu VIP sebagai mitra, maupun VVIP sebagai tamu kehormatan. Namun kondisi pengamanan di Obvitnas tersebut masih sangat longgar, dan dilakukan secara parsial oleh ketiga lembaga tersebut, meski dalam satu kawasan dan menggunakan jalur masuk dan keluar yang sama.

Karena itu, pelaksanaan pengamanan di Kompleks Parlemen yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan di masing-masing lembaga perlu dilakukan perubahan manajemen dan tata kelola, serta dikendalikan dalam satu komando.

Peraturan DPR tentang Pengamanan Terpadu di MPR, DPR dan DPD serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha terdiri 12 bab, 57 pasal dan dua lampiran. Dalam peraturan tersebut antara lain disebutkan, struktur organisasi satuan pengamanan terpadu terdiri seorang Direktur dan satu orang Wakil Direktur selaku unsur Pimpinan. Selain itu, terdapat dua orang Kepala Bagian selaku unsur pembantu Pimpinan dan tiga orang Kepala Satuan selaku pelaksana tugas. ■ mp/sf



DPR Setujui Kerja Sama Pertahanan RI-Thailand

Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4) menyetujui RUU Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand. DPR dan pemerintah sudah membahas kerja sama pertahanan ini sejak Maret 2018.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat membacakan laporannya di hadapan Rapat Paripurna menyampaikan, untuk membahas RUU ini, Komisi I sudah mengundang para pakar untuk memberi masukan atas pentingnya kerja sama pertahanan ini. Pihak pemerintah pun memandang penting kerja sama ini.

“Pembahasan pembicaraan tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya, fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan

Dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, kami berharap keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang kerja sama di bidang pertahanan untuk dibahas dalam pembicaraan tingkat II,” kata Asril.

Setelah pembicaraan tingkat II, diharapkan Rapat Paripurna mengesahkan RUU ini menjadi UU. Seperti diketahui, kerja sama pertahanan kedua negara sudah ditandatangani pada 21 Mei 2015 di Jakarta. “Dengan disahkannya persetujuan ini menjadi undang-undang, kami berharap keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Kerja sama pertahanan ini, sambung Asril, diharapkan mampu menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara. Dalam memori kerja sama itu disebutkan bahwa kerja sama pertahanan ini akan berdampak pada hubungan saling menguntungkan bagi pertahanan RI dan Thailand. ■ mh/sc



Pimpinan DPR RI menerima laporan RUU Pengesahan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Indonesia dan Thailand dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

foto:Anrief/hr

Peksos dan TKS Perlu Disetarakan Kewenangannya

Praktik Pekerjaan Sosial yang ada saat ini diharapkan merupakan kerja tim yang saling bersinergi antara Pekerja Sosial (Peksos) dan Tenaga Kerja Sosial (TKS). Karena itu, perlu disetarakan kewenangannya. Karena pada kenyataannya sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terdiri Peksos dan TKS, bahkan cenderung lebih banyak SDM TKS-nya.

Demikian harapan yang disampaikan Yayasan Sayap Ibu pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi TB Ace Hasan Syadzili di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

RDPU digelar dalam rangka menghimpun masukan bagi pembahasan RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial. Selain Yayasan Sayap Ibu, juga hadir Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI) dan Komnas Perempuan.

Kepada Komisi VIII DPR, Yayasan Sayap Ibu mengharapkan agar Peksos

dan TKS selanjutnya diberi kewenangan dan legitimasi hukum yang sama, agar bisa saling bersinergi sebagai tim sosial yang solid. Selain itu, lembaga sosial yang memiliki SDM Peksos dan TKS ke depan diharapkan diberi kewenangan untuk mensinergikan perannya dalam pelayanan sosial yang lebih optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas Perempuan menekankan Peksos harus mendapatkan perlindungan melalui pengakuan hasil *assessment* atau kinerja, pengakuan atas mutu/kualitas kerja dan perlindungan terhadap keselamatan dalam menjalankan tugasnya, baik dalam daerah



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzili

foto: Anief/hr

konflik maupun bencana.

Sedangkan KPSI memberi masukan agar penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara mencakup rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial. ■ mp/sf



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto

foto: Kresno/hr

Langkah Pemerintah Bangun Industri Mobil Listrik Dinilai Tepat

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) cukup tepat memimpin pembangunan industri mobil bertenaga listrik. Pasalnya, pengembangan mobil listrik ini bisa menjadi bagian dalam kerangka 'Making Indonesia 4.0' yang baru-baru ini dicanangkan dan mendapat dukungan penuh Presiden Joko Widodo.

“Kami memandang rencana pemerintah mengembangkan mobil listrik dan inisiatif 'Making Indonesia 4.0' adalah dua hal yang dapat disinergikan untuk memberikan hasil lebih optimal dengan memanfaatkan kumpulan pengetahuan, jaringan, dan pengalaman selama ini dalam membangun industri otomotif Indonesia,” ujar Dito dalam siaran pers yang diterima Parlemen, Senin (9/4).

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, Kemenperin baru saja meluncurkan

inisiatif “Making Indonesia 4.0” dan menjadikan otomotif sebagai salah satu dari lima sektor industri yang diunggulkan untuk dikembangkan. Pembuatan mobil listrik bukan semata soal menggantikan bahan bakar dari hasil pengolahan minyak bumi menjadi listrik. Namun, lebih untuk menggantikan sebagian besar material dan proses manufaktur, dibandingkan cara memproduksi unit-unit otomotif berbahan bakar minyak sekarang.

“Ini menjadi tantangan bagi industri

otomotif Indonesia untuk mampu menjawabnya,” katanya.

Dito menilai pengembangan mobil listrik membutuhkan banyak dukungan, seperti dukungan dari Presiden Jokowi yang telah diungkapkannya secara langsung dalam ajang Industrial Summit 2018 baru-baru ini. Meski demikian menurutnya, hal tersebut juga harus ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perpres (peraturan presiden) mengenai mobil listrik ini, yang sejatinya sudah

cukup lama ditunggu-tunggu.

“Semoga Perpres yang segera diterbitkan menampung usulan mensinergikan proyek mobil listrik dengan “Making Indonesia 4.0”, termasuk kepemimpinannya,” jelas Dito.

Selain itu pengembangan mobil bertenaga listrik ini juga harus seutuhnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak, tidak hanya dari instansi pemerintah seperti Kemenperin, Kementerian Ristekdikti, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM.

Melainkan juga dukungan dan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset yang mampu melakukan riset-riset di bidang pembuatan mobil listrik, termasuk di dalamnya material apa saja yang digunakan, sistem manufaktur, pendanaan hingga pemasarannya.

Bahkan, pengembangan mobil listrik juga butuh dukungan dari industri-industri otomotif yang selama ini telah melakukan kegiatannya secara nyata di tanah air. Pasalnya, pengembangan mobil listrik ini, tidak saja karena alasan

mengurangi pemakaian BBM, menurunkan polusi udara termasuk emisi gas rumah kaca, atau karena ke depan penduduk dunia akan lebih banyak menggunakan mobil listrik. Namun, lebih dari itu, karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam pengembangan industri otomotif untuk pasar domestik maupun regional.

“Semoga mobil listrik ini segera terwujud di Indonesia, sebagai negara besar yang telah lama bercita-cita memiliki industri otomotif ‘Merah Putih’-nya sendiri,” pungkasnya. ■ ayu/sc

Kadinsos Provinsi Diminta Tingkatkan Program Sentuh Masyarakat

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja para Kepala Dinas Sosial Provinsi yang bekerja keras meningkatkan kesejahteraan sosial, meski belum ada proporsional dukungan anggaran. Komisi VIII mendorong para Kepala Dinas Sosial Provinsi meningkatkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat. Program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Layak Huni, Penyaluran Rastra dan E-Warong.

Itulah kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Marwan Dasopang dengan sepuluh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4). Hadir dalam rapat ini, antara lain Kadinsos Provinsi Sumut, NTB, Jabar, DKI Jakarta, Sumsel dan Lampung.

Komisi VIII juga minta Kadinsos meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberi respon cepat beberapa permasalahan yang dihadapi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang

Selain itu, Komisi VIII juga akan segera menindaklanjuti bersama Kemensos dengan memberikan dukungan anggaran yang bersumber APBN guna merespon beberapa kebutuhan mendesak. Diantaranya

pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial AIDS, Panti Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa dan penanganan korban NAPZA. Selain itu, meningkatkan jumlah maupun kemampuan, profesionalitas dan ketrampilan SDM dinas sosial serta pekerja sosial.

Kepada para Kepala Dinas Sosial, Komisi VIII juga minta meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberi respon cepat beberapa permasalahan yang dihadapi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Respon cepat itu dalam bentuk pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penanganan kemiskinan, korban sosial bencana alam, korban sosial buruh migran, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Komisi VIII juga mendesak Kadinsos dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan kerja sama dengan satuan kerja lainnya di daerah, kelembagaan sosial, lembaga keagamaan serta dunia usaha. Juga diminta menjalin kerja sama dengan Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga tidak ada lagi penolakan atau lepas tanggungjawab dalam menangani PMKS. ■ mp/sf



Tim Kunjungan kerja BKSAP DPR RI dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf bersama dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe

Sulut Terapkan SDGs Untuk Sejahterakan Rakyat

Perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup baik. Beberapa diantara capaian tersebut yaitu penurunan angka kemiskinan, pendidikan bagi kaum perempuan dan pelayanan akses kesehatan.

Demikian penilaian yang disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat memimpin Tim Kunjungan Kerja BKSAP ke Manado, Sulut, Kamis (5/4).

Dijelaskan Nurhayati, SDGs merupakan agenda pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integritas, dan inklusif. Dalam SDGs tidak ada seseorang pun yang terlewatkan atau *'No-one Left Behind'*.

"Kami melihat sudah banyak yang dicapai, misalnya penurunan angka kemiskinan, penurunan gini rasio, tingkat pendidikan *gender equality* atau pemberdayaan perempuan, dan kesehatan," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Nurhayati menambahkan, BKSAP ingin agar Sulut meningkatkan peran

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengoptimalkan ekspor impor. Depo bahan bakar SPBU di perbatasan harus segera dibangun.

"Walaupun Sulut dikelilingi laut, tetapi bahan bakunya masih impor. Saya berharap agar pemerintah pusat bisa memberi kelonggaran dan kemudahan kepada Sulut yang dikelilingi laut untuk kemakmuran rakyat di daerahnya," tutup politisi dapil Jawa Timur V ini.

Gubernur Sulut Olly Dondokambe yang menerima delegasi Panja SDGs BKSAP DPR RI mengatakan, kunjungan ini diharapkan membawa solusi bagi Sulut yang ingin mencapai target SDGs. Sulut ingin meningkatkan sektor perikanan dan ekspor impor dengan mengoptimalkan Pelabuhan Internasional Bitung.



Foto:Azka/hr

Saat ini, Sulut telah menetapkan beberapa program prioritas daerah yang sinergis dengan tujuan SDGs. Ia lalu mencontohkan program itu meliputi pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, infrastruktur, pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim.

SDGs sendiri terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam melanjutkan upaya pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Soeharto (F-PG), Rofi' Munawar (F-PKS), dan Nurhayati Monoarfa (F-PPP), serta sejumlah Anggota BKSAP, diantaranya Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), Ono Surono (F-PDI Perjuangan), Arief Suditomo (F-Hanura), Jazuli Juwaini (F-PKS), dan Bara Hasibuan (F-PAN).

■ azk,mh/sf

Reformasi Birokrasi DPR Sudah Berjalan Baik

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) dari tahun 2012. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menilai, RB di DPR sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maya, panggilan akrab Damayanti, dalam Rapat Koordinasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang membahas Expose Laporan RB Tahun 2017 di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

“RB yang diketuai oleh Asep Ahmad Saefulloh ini sudah berjalan dengan baik dan kami memutuskan setiap hari Rabu setiap minggunya mengadakan rapat koordinasi. Ini merupakan salah satu langkah untuk perubahan pemikiran kita. Dengan adanya ini, kita bisa saling mengingatkan, menjaga dan lain sebagainya,” tambah Maya.

Adapun hasil laporannya, lanjut

Ini merupakan salah satu langkah untuk perubahan pemikiran kita. Dengan adanya ini, kita bisa saling mengingatkan, menjaga dan lain sebagainya

Maya, masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan itu ada yang bersifat rutin, ada pula yang harus diselesaikan dengan terobosan baru. Tetapi secara keseluruhan, laporan ini sudah baik dan dapat meningkatkan tunjangan kinerja pegawai Setjen dan BK DPR RI.

Sedangkan Ketua RB Setjen DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengatakan, RB ini sudah berjalan hampir 7 tahun dan ada 8 area yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini guna mengoptimalkan kinerja RB kedepannya. Menurutnya,

secara umum pelaksanaan RB sudah 90 persen berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih ada permasalahan yang dijumpai, misalnya SDM.

“Kita belum memiliki alat ukur tingkat kompetensi pegawai, seharusnya kita sudah memilikinya. Sehingga kita punya *database* untuk memudahkan melakukan promosi dan mutasi pegawai,” jelas Asep.

Kemudian, tambah Asep, terkait area pelayanan publik. Ia menjelaskan, meskipun Setjen dan BK DPR RI sudah mempunyai pelayanan satu atap, namun baru sebatas seremonial. Namun secara keseluruhan, semua area sudah melakukan kinerja yang maksimal.

“Ini hasil sinergi dari berbagai unit yang ada di lingkungan Setjen dan BK DPR. Bagaimana keberhasilan RB yang sudah dilaporkan tadi akan dinilai oleh MenPAN RB pada akhir bulan ini,” kata Asep. ■ cas/sf



Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti

Foto:Rumi/hr

Bambang Haryo Nilai Pembangunan Infrastruktur Tak Bawa Asas Manfaat

Pembangunan sejumlah infrastruktur sebagai kunci kemajuan ekonomi yang gencar dilakukan pemerintah dinilai tidak membawa asas manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono kepada Parleментарaria, baru-baru ini.



Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono

foto: Jaka/hr

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama empat tahun terakhir (2014-2017) pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 sebesar 5,01 persen, tahun 2015 sebesar 4,88 persen, tahun 2016 sebesar 5,03 persen, dan tahun 2017 sebesar 5,07 persen.

“Ini membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi tidak membawa asas manfaat. Padahal, Presiden juga membuat 16 paket kebijakan ekonomi, salah satunya adalah logistik. Tapi, tidak pernah dievaluasi apakah paketnya itu jalan apa *enggak*,” ungkap Bambang.

Politisi F-Gerindra ini menjelaskan, lazimnya negara yang sedang membangun infrastruktur seharusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Karena satu step pembangunan infrastruktur akan membawa efek *multiplier* ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya 16 kebijakan paket ekonomi pemerintah yang jika diimplementasikan dengan baik, maka

dapat mendongkrak percepatan ekonomi nasional.

“Tapi lihat infrastruktur yang dibanggakan misalnya di Papua, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2013 sebesar 14,84 persen. Begitu dibangun malah menurun menjadi 4,64 persen pada tahun 2017,” jelasnya. Sisi lain, pembangunan yang masif diharapkan membuka lapangan pekerjaan, justru tidak membawa dampak signifikan.

Kebijakan pemerintah yang menetapkan batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur lebih dari Rp100 miliar dikerjakan BUMN, membuat kontraktor mengalami kesulitan ekonomi. Tak hanya itu, Bambang juga mempertanyakan urgensi sejumlah infrastruktur yang tengah dibangun di sejumlah daerah. Pasalnya, tak sedikit pembangunan bendungan, jalan tol, maupun bandara yang setelah diresmikan justru tidak dimanfaatkan.

Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah membangun tidak berdasarkan skala prioritas. Seperti Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, justru tidak beroperasi. “Banyak anggaran yang sudah dihabiskan membangun bandara tersebut, tetapi hanya didarati burung-burung,” imbuhnya. ■ ann/sf

Tata Niaga Bawang Putih Dikendalikan Importir

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyimpulkan, saat ini tata niaga bawang putih merupakan pasar oligopoli, dimana harga maupun pasokan barangnya dikendalikan hanya beberapa orang importir. Hal tersebut terungkap usai Komisi IV DPR menggelar audiensi dengan pedagang bawang putih di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (10/4).

“Hari ini kami menerima kedatangan para pedagang bawang putih dari beberapa daerah. Mereka mengeluhkan tidak adanya pasokan bawang putih yang bisa mereka jual. Tentu ini masalah besar, karena sejak tahun 2017, 97 persen atau sekitar 450 ribu ton bawang putih di

pasaran adalah impor. Padahal pemerintah telah merencanakan pada tahun 2019 swasembada bawang putih. Sehingga di tahun 2018 ini target impor diturunkan menjadi 300 ribu ton,” ujar Viva Yoga.

Tidak hanya itu, pemerintah juga telah mewajibkan importir untuk menanam sendiri bawang putih sebanyak

lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut kemudian tentu memunculkan pertanyaan, apakah benar importir tersebut telah menanam sendiri bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang diberikan pemerintah. Jika sudah dilakukan, dimanakah letak

Komisi III Tindaklanjuti Sengketa Lahan Rumbai

Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Trimedya Panjaitan melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (6/4). Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPR RI melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penegakan hukum terhadap Poniman atas kasus sengketa lahan di Rumbai.

“ Kita kemari karena ada laporan dari masyarakat. Prinsipnya kita tidak mengintervensi, tetapi mengawal proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Trimedya usai rapat tertutup dengan Kapolda Riau, Kejati Riau, BNNP Riau, dan Kakanwil Hukum dan HAM Riau.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menerangkan, sebelumnya pada tanggal 29 Januari 2018 lalu, pihaknya menerima pengaduan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dugaan kriminalisasi hukum dalam sengketa lahan milik Poniman yang terletak di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Riau.

Dalam laporan tersebut, Marni yang merupakan isteri Poniman, bersama kuasa hukumnya menuntut keadilan atas dugaan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan pihak Polresta Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri setempat.

Seperti diketahui, kasus Poniman bermula pada 8 Juni 2016 saat Jon Mathias yang mewakili PT Berkah Mitra Kumala (BMK) melaporkan Poniman ke

Polresta Pekanbaru dengan tuduhan pemalsuan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang sebidang lahan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Sengketa lahan yang menyeret Poniman sebagai pesakitan berada di kawasan yang berdekatan dengan areal seluas 400 hektar yang diduga kuat akan dikuasai secara paksa oleh perusahaan BMK.

Atas laporan tersebut, Poniman kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Maret 2017 dan ditahan pada 19 Oktober 2017. Tidak terima atas penetapan tersangka tersebut, Poniman melalui kuasa hukumnya mengajukan praperadilan pada 24 November 2017 di PN Pekanbaru. Meski masih dalam proses praperadilan, Kejari Pekanbaru tetap menerima berkas perkara Poniman dan dinyatakan P-21 pada 18 Desember 2017. Selanjutnya, Poniman dinyatakan menang praperadilan oleh PN Pekanbaru pada 20 Desember 2017.

Kejari Pekanbaru tetap melimpahkan berkas perkara Poniman ke PN Pekanbaru pada 21 Desember 2017, atau satu hari setelah kasus tersangka Poniman dinyatakan gugur. Bahkan,

bawang putih lokal itu sendiri.

Pasalnya, menurut pengakuan perwakilan pedagang bawang putih yang disampaikan oleh Ibu Hajah Chairul, selama beberapa tahun belakangan pihaknya hanya menjual bawang putih impor, bukan bawang putih lokal yang ditanam petani dalam negeri. Hal itu juga didukung temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang telah menemukan sembilan kejanggalan dalam tata niaga pangan.

Hajah Chairul mengatakan bahwa pihaknya hanya menginginkan ketersediaan bawang putih untuk dijual. Ia tidak mempedulikan dimana bawang putih itu sendiri berada, apakah dari impor atau dari petani lokal. Karena sudah lebih dari seminggu pihaknya tidak



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan

foto:Anne/hr

ekspeksi yang diajukan kuasa hukum Poniman juga dikabulkan dalam putusan sela tertanggal 22 Januari 2018. Adapun isi putusannya adalah membebaskan Poniman dari Rutan Kelas II B Pekanbaru. Ironisnya, pada hari yang sama sesaat Poniman keluar dari Rutan, kembali ditangkap aparat Polresta Pekanbaru dengan menunjukkan Sprindik baru yang ditandatangani pada hari yang sama juga.

Turut hadir dalam kunjungan kerja ini, Anggota Komisi III DPR Junimart Ginsang (F-PDI Perjuangan), Arteria Dahlan (F-PDI Perjuangan), John Kenedy Azis (F-Golkar), Yosef Badeoda (F-Demokrat), Daeng Muhammad (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Taufiqulhadi (F-NasDem). ■ ann/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

foto: Jaka/hr

menjual bawang putih. Hal ini tentu mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilannya.

Lebih lanjut, Viva yang didampingi oleh beberapa Anggota Komisi IV DPR lainnya seperti Oo Sutisna, Sudin, Fakhry Salim, Rahmad Handoyo, Hendro, Endang Srikanti Handayani dan Umar Arsal mengatakan bahwa untuk mencari solusi dan titik terang dari permasalahan tersebut, pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan dengan beberapa menteri seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Polisi dan beberapa pihak terkait. Agar ke depan tidak ada lagi oligopoli (yang dikendalikan hanya oleh beberapa orang saja) dalam sistem niaga Indonesia. ■ ayu/sc

Komisi III Minta KY Periksa Ketua PN Banggai

Komisi III DPR RI meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banggai, Sulawesi Tengah Ahmad Yani, terkait kasus eksekusi lahan di kawasan Tanjung Sari, Kota Luwuk, pada 19 Maret 2018 lalu.



Ketua Tim Kunker Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding saat memberikan penjelasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng

Setelah kami turun ke lapangan dan mendengar dari para korban eksekusi serta pejabat instansi terkait, kami menilai ada *'error in person'* pada Ketua PN Banggai selaku pelaksana eksekusi," ungkap Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR Syarifuddin Sudding, usai rapat tertutup dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng, Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, pejabat yang mewakili Gubernur Sulteng, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulteng, Bupati Banggai, dan para korban eksekusi di Sulteng, Selasa (10/4)

Untuk itu, Sudding meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa panitera PN Banggai selaku eksekutor dan seluruh jajaran terkait eksekusi tersebut. "Selain itu, kami juga akan meminta Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan eksekusi tersebut," tegasnya.

Politisi Partai Hanura itu menjelaskan, proses eksekusi yang dilakukan PN Luwuk tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam Amar putusan seharusnya hanya 38,984 meter persegi yang di eksekusi namun dalam pelaksanaannya panitera mengeksekusi lahan seluas 18 hektar yang di dalamnya ada 65 pemukiman warga yang memiliki Alas Hak yang sah sesuai dengan Perundang-undangan.

"Harus ada pihak yang bertanggung jawab, karena ini merupakan pelanggaran HAM terhadap warga yang tidak bersengketa namun menanggung konsekuensi dari eksekusi," jelasnya.

Diakhir pertemuan tersebut, Sudding meminta semua pejabat instansi terkait sepakat untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-

hak keperdataan warga yang memiliki sertifikat hak milik dan HGB yang sah di atas lahan yang telah dieksekusi. Terkait nasib warga korban eksekusi yang kini tinggal di tenda-tenda pengungsian. Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Banggai agar mengalokasikan dana APBD guna memenuhi hak-hak hidup para korban.

"Bupati Banggai harus mengalokasikan anggaran pada APBD setempat untuk memelihara kehidupan para korban sampai ditemukan penyelesaian komprehensif atas masalah ini," tutupnya.

Turut serta dalam Kunjungan Kerja Komisi III ini, antara lain Supratman Andi Agtas (F-Gerindra), Mohammad Toha (F-PKB), Abdul Wagab Dalimunthe (F-Demokrat), Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan) dan Saiful Bahri Ruray (F-Golkar) dan Anwar Rahman (F-PBK). ■

rmm/sc



Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutahuruk

Foto:Rumi/rni

“Waktu kita *drafting* (UU Pemilu) kan dibatasi di UU. Bahwa ada kompetensi yang diatur dalam UU, khususnya menyangkut *parliamentary threshold*, yang tidak bisa kita pisahkan dari seluruh parpol yang bertanding. Jadi yang dimaksudkan adalah, kalau ada yang tidak punya *parliamentary threshold*, tidak masuk di dalam,” kata Rufinus saat rapat dengan pendapat Komisi II dengan KPU

Partai Baru Tidak Berhak Sumbang Dana Kampanye Capres

Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutahuruk menyatakan partai baru tidak memiliki hak ikut memberikan sumbangan dana kampanye kepada capres yang didukung. Sebab, menurutnya, hal itu bertentangan dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

dan Bawaslu yang membahas Peraturan KPU (PKPU), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Politisi Hanura ini menuturkan, jika partai politik yang memperoleh persentase tinggi pada Pemilu 2014 yang seharusnya memberikan sumbangan untuk itu. Partai baru justru seharusnya tidak masuk dalam ketentuan untuk menyumbang.

“Tidak ada penafsiran di situ. Jadi menurut pandangan saya, logika hukumnya adalah seluruh partai politik yang mempunyai persentase di pemilu

yang lalu. Jadi, kalau yang baru, mungkin itu tidak masuk. Karena kalau kita masuk ke *parliamentary threshold* yang sudah dibatasi di UU, bukan berarti menabrak konstitusi,” tuturnya.

Dalam rapat yang berlangsung kemarin tersebut, semua Anggota Komisi II menyampaikan pandangannya, perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Tak hanya dana kampanye, hak partai baru dalam mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 juga menjadi hal yang diperdebatkan. ■ hs/sc

Komisi I Panggil Facebook Guna Telusuri Penyalahgunaan Data

Komisi I DPR RI akan memanggil Perwakilan Facebook Indonesia. Pemanggilan ini guna menelusuri penyalahgunaan data privasi para pengguna Facebook di Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, agenda pemanggilan Facebook dimaksudkan untuk meminta klarifikasi kebocoran data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica.

“Kita akan tanya apakah dia (Facebook) bisa *me-recover* atau data satu juta pengguna dari Indonesia itu dimanfaatkan untuk apa? Kalau belum dimanfaatkan, itu sebetulnya belum ada kerugian, hanya bocor, baru masuk ke Cambridge Analytica,” papar Satya kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Cambridge Analytica (CA) adalah konsultan politik yang membantu kampanye kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS 2016 lalu. Sebanyak 87 juta data pengguna Facebook global dicuri, 1 juta di antaranya berasal dari Indonesia.



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha

Foto:Alief/hr

Satya menyampaikan ada beberapa poin yang hendak didalami Komisi I dari Facebook.

Komisi I ingin memastikan seberapa masif dampak buruk yang diterima pengguna Facebook Indonesia atas insiden CA. “Kami (akan) menanyakan apakah Facebook bisa memperbaiki ini, lalu data pengguna dimanfaatkan untuk apa,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Satya belum bisa dipastikan apakah kasus ini akan berujung ke pemblokiran Facebook di Indonesia atau tidak. Namun prinsipnya Komisi I memberikan dukungan pemerintah untuk bersikap tegas, tetapi harus melalui berbagai pertimbangan. “Yang utama harus dipertegas dulu data penggunaan Indonesia sudah ada penyalahgunaan atau tidak,” tandasnya.

Selain itu, Satya juga akan meminta penjelasan kepada Facebook, apakah CA ini ada kaitannya atau tidak dengan lembaga survei di Indonesia. “Kalau belum, kita minta dilindungi untuk yang satu juta itu, karena kita tidak punya pilihan lain. Beda kalau China yang punya pengganti Facebook, kalau berhenti bisa pindah ke yang lain. Makanya, kita ingin lihat *misused* atau tidak data yang ada di Indonesia,” jelasnya. ■ eko/sf

Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dia mengkhawatirkan peraturan ini bisa mengancam tenaga kerja lokal. Ironisnya, Bahkan yang lebih ironi, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi permasalahan serius.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay

memuat alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

■ eko/sf

“ Karena itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi keluarnya Perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal,” papar Saleh dalam keterangan persnya kepada Parleментарia, Minggu (8/4).

Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini beranggapan, masuknya TKA mempersulit penciptaan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Bahkan tak menutup kemungkinan tenaga kerja dari luar negeri menyebarkan ideologi yang tak sepaham dengan Pancasila.

“Saya khawatir justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Bisa saja orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba,” ujar Saleh.

Dia juga tidak sepaham dengan alasan

pemerintah dalam penerbitan Perpres tersebut yang beralasan peraturan ini untuk menarik investasi dan perbaikan perekonomian. Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat karena selama ini banyak investasi asing yang mudah mendapat tempat dan dilindungi. Menurut Saleh, sejauh ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pun tidak mengalami kendala.

“Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan,” jelas Saleh.

Ditegaskan dalam Perpres tersebut, setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya

Foto: Azka/hr

Film Bisa Jadi Alat Diplomasi

Film bisa dikembangkan menjadi alat diplomasi pemerintah kepada dunia internasional. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum mengoptimalkan industri film nasional, sehingga film belum mampu membantu diplomasi pemerintah, apalagi sebagai alat propaganda.



Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda

Foto: Kresno/hr

Bank Syariah Harus Lebih Maju

Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mendorong bank syariah khususnya Bank Muamalat untuk mampu berkembang lebih maju lagi. Ia berpandangan, secara likuiditas Bank Muamalat kini cukup kuat sehingga perlu didorong lagi agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi pertumbuhan ekonomi.



Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun

foto:Jaka/hr

Sehingga ia meyakini bahwa permasalahan yang terjadi di Bank Muamalat dapat segera diatasi. “Perbankan prinsip utamanya harus hati-hati. Ketika bicara hati-hati maka yang jadi prinsip utama adalah data. Nah di Bank Muamalat ini ada hal menarik, Bank Muamalat tidak ada masalah terkait likuiditas, secara fundamental *fund*-nya cukup kuat. Permasalahan di Bank Muamalat adalah bank ini tidak boleh berada di posisi sekarang, bank ini harus maju,” ungkap Misbakhun saat rapat dengar pendapat Komisi XI dengan OJK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Misbakhun melanjutkan, siapapun yang pegang saham dan minat melakukan investasi di Bank Muamalat sangat dibutuhkan agar Bank Muamalat tidak

berada di posisi sekarang ini. Bank ini harus memacu pertumbuhan ekonomi nasional lebih kuat. Karena menurutnya, perbankan syariah bukan untuk umat islam saja, tapi untuk seluruh masyarakat.

“Ini perlu didorong, karena sistem syariah bukan untuk orang islam saja. Semua bisa melakukan. Saya jadi agak mempertanyakan regulasi dan langkah apa yang sudah OJK lakukan agar membuka peluang bank ini untuk bisa lebih besar dari posisi saat ini,” tutur Misbakhun.

Hal senada juga diungkap oleh Ketua DK-OJK Wimboh Santoso yang mengungkapkan saat ini Bank Muamalat beroperasi secara normal dengan likuiditas cukup kuat dan dana sustain permodalan terjaga di atas minimum *threshold* 5 persen. “Masalah di Bank Muamalat yakni adanya kebutuhan penambahan modal untuk memperluas ekspansi Bank Muamalat. Bank ini *basic business*-nya bagus hanya perlu tambah modal agar bisa berkembang lebih besar lagi,” jelas Wimboh.

Sebagai informasi, pemegang saham mayoritas Bank Muamalat saat ini adalah Islamic Development Bank (IDB) sebesar 32,74 persen, Bank Boubyan 22 persen, Atwil Holding Limited 17,91 persen, dan National Bank of Kuwait 8,45 persen. Sisanya dimiliki oleh perorangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

■ hs/sc

Di Amerika Serikat, pemerintahnya bisa berdiplomasi lewat film. Dengan film, pemerintah Amerika menunjukkan kekuatan alutsistanya. Mereka menunjukkan independensi perempuan juga lewat film. Film selain sebagai alat diplomasi juga alat propaganda. Tapi, itu tidak terjadi di Indonesia,” demikian dikemukakan Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda kepada Parlemen di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Dikatakan Venna, saat ini APBN belum menganggarkan secara khusus industri film nasional. Di sinilah perhatian pemerintah tak maksimal. Ini bisa terlihat dari Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang diamanatkan UU No. 33/2009 tentang Perfilman untuk mengurus industri film nasional tak mendapat anggaran dari APBN. Jadi, tak banyak yang bisa diperbuat. “BPI diamanatkan untuk mengurus film Indonesia. Tapi tak mendapat dana apa pun dari APBN. Ini jadi masalah,” imbuhnya.

Sebetulnya, sambung politisi dapil Jatim VI ini, ada banyak badan yang bersentuhan dengan industri film nasional. Selain BPI, ada Pusbang Film Kemendikbud, dan Bekraf. Ketiganya harus bersinergi membangun industri film nasional yang berkualitas penuh nilai edukasi dan menghibur penontonnya. Dan sampai saat ini belum ada badan yang mengukur kualitas film Indonesia. Para investor mengukur kualitas film dari banyaknya penonton. Padahal, bukan itu ukurannya.

Anggota F-PD DPR ini berharap, pemerintah memberi dukungan infrastruktur industri film agar film nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Infrastruktur film yang dimaksud adalah membangun sekolah dan perguruan tinggi dengan program studi perfilman. Dengan begitu, kelak akan lahir banyak SDM film yang profesional sekaligus mampu membendung infiltrasi asing lewat film.

Persaingan industri film, sambung Venna, begitu ketat sejak dibukanya daftar

negatif investasi (DNI) oleh pemerintah. Film nasional *head to head* menghadapi serbuan film impor dari Hollywood maupun Bollywood. Walau ada regulasi yang mengatur peredaran film, yaitu film nasional 60 persen dan film impor 40 persen, tetap saja film nasional kalah bersaing. Masih banyak isu yang harus dibenahi dari industri film nasional. Komisi X sudah membentuk Panja Perfilman yang isi rekomendasinya merevisi UU lama perfilman.

“Film nasional harus seperti di Korea Selatan. Di sana BPI-nya berfungsi dan didukung oleh negara. Pajak film yang selama ini dikutip juga harus kembali ke industri film. Ini memang harus diatur. Banyak sekali menurut saya uraian perfilman di RUU Perfilman. Nanti UU Perfilman yang baru harus punya PP atau Permen. Jangan mengulang tahun 2009 yang tidak ada PP dan Permentnya. Akhirnya, film nasional tidak ada yang mengurus,” tutup Venna.

■ mh/sc



Wakil Ketua BURT DPR RI Hasrul Azwar

foto: Singgih/hr

BURT DPR Pantau Pelayanan Jamkestama RS Hermina Semarang

Rumah Sakit (RS) Hermina Banyumanik, di Semarang, Jawa Tengah, merupakan salah satu *provider* PT. Asuransi Jasindo yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi pejabat negara, salah satunya Anggota DPR RI beserta keluarganya. RS Hermina telah resmi menjadi *provider* PT Asuransi Jasindo yang otomatis memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pejabat negara dan keluarganya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar menyampaikan, kedatangan Tim BURT DPR RI ke RS Hermina untuk memastikan kesiapan RS melayani pasien Jamkestama.

“Kita datang kemari untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang sudah menjadi *provider* Jasindo dalam melayani pasien Jamkestama, salah satunya Anggota DPR RI dan keluarganya,” ungkap Hasrul, di Semarang, Jateng, Kamis (5/4).

Lebih lanjut, Hasrul menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan RS

Hermina terhadap pejabat negara harus dipastikan kesiapannya, karena telah ditunjuk oleh PT. Jasindo sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana diketahui, ada 2700 pasien dan belum termasuk keluarganya yang merupakan pasien Jamkestama.

“Kita juga ingin memastikan fasilitas serta peralatan yang dimiliki dalam melayani pasien Jamkestama, jangan sampai *provider* yang telah ditunjuk PT. Jasindo tidak siap dalam melayani para pejabat negara,” ungkap politisi F-PPP itu.

Hasrul juga berharap RS Hermina dapat memaksimalkan pelayanan pasien Jamkestama dan bisa terus meningkatkan

fasilitas dan peralatan Rumah Sakit. Diketahui, RS Hermina berdiri sejak 2014 dan merupakan Rumah Sakit tipe C.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti (F-Gerindra), Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso (F-PD), M. R. Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Andi Iwan Darmawan (F-Gerindra), Agus Sulistiyono (F-PKB), Ansory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago (F-NasDem), Katherine Angela Oendoen (F-Gerindra), dan Fauzih H. Amro (F-Hanura). ■ skr/sf

Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28 April mendarat, harus kembali diperpanjang. Karena banyak mengatur hal-hal yang baru, Pansus meminta tambahan waktu satu masa persidangan lagi.

Demikian ditegaskan Ketua Pansus RUU PTPT Muhammad Syafi'i kepada Parlemen di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4). Syafi'i berharap pembahasan RUU ini bisa diselesaikan pada Masa Persidangan V tahun 2017/2018 yang akan dibuka 18 Mei

mendatang.

Menurut politisi Gerindra yang akrab dipanggil Romo ini, sebetulnya pembahasan RUU bisa selesai sebelum reses, tapi karena Pimpinan Timus sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, maka diundurkan. Di sisi lain, pemerintah mengajukan RUU hanya soal penindakan,

karena ada usulan dan rumusan baru, maka selalu meminta waktu untuk merumuskan. Sehingga secara teknis pembahasan RUU ini menjadi lebih lama.

“Bagi kami yang penting hasil rumusan RUU menjadi lebih bagus. Karena itu diperkirakan masih perlu satu kali masa sidang untuk menuntaskan RUU ini,” jelasnya dengan menambahkan bahwa setelah pembahasan di Timus masih harus dibawa ke Tim Sinkronisasi (Timsin), lalu kembali melapor ke Panja kemudian ke Pansus.

Romo menjelaskan, pembahasan RUU PTPT cukup komprehensif dan

ada hal-hal paling baru, diantaranya masalah pencegahan dan pemulihan korban. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai *leading sector*, pelibatan TNI dan perlunya badan pengawas.

“Khusus Badan Pengawas nanti dari Komisi I dan Komisi III dan sifatnya permanen. Mungkin orangnya berganti, tapi anggota Badan Pengawas itu dari Komisi I dan III DPR,” ia menambahkan.

Hal baru lainnya, adalah definisi dimana sebelumnya yang tidak ada. Kemudian sisi pencegahan, pelibatan 36 kementerian dan lembaga, penguatan BNPT dan pemulihan korban. “Kita ingin dengan UU ini bukan hanya merespon apa yang terjadi, tetapi juga menata antisipasi ke depan,” tegasnya.

Saat ditanya begitu banyak hal diatur termasuk pencegahan, apakah DPR optimis tidak muncul lagi aksi teror, Romo dengan diplomatis menjawab, “Kita sudah berusaha. Paling tidak dengan apa yang sudah dikerjakan itu telah memutus mata rantai untuk ‘mereproduksi’ teroris,” imbuhnya.

Pengalaman selama ini, bapaknya teroris, kemudian ditangkap di depan anaknya dan diperlakukan tidak manusiawi, maka ada Jibril, ada Abu Jibril nanti ada cucu Jibril lalu Ibnu Jibril, karena tidak diputus mata rantainya. Harusnya anak Abu Jibril dicari dan dibina supaya tidak menularkan paham itu.

“Harapannya doktrin teror itu bisa dipatahkan. Kalau mereka buat narasi, kita buat kontra narasi. Mereka buat isu, maka kita buat kontra isu, ada provokasi, kita buat kontra provokasi. Maka kita melibatkan banyak pihak. Sekarang di BNPT itu profesor dari semua bidang ilmu, ada disiplin ilmu fisika, ada keagamaan, dari UIN buat kontra narasi serta profesor lainnya,” pungkask politisi dapil Sumut ini.

■ mp/sf



Ketua Pansus RUU PTPT Muhammad Syafi'i

Foto: Arief/hr



Ketua GKSBB BKSAP DPR RI Indonesia-Meksiko, Djoko Udjianto berbincang dengan Duta Besar Meksiko untuk Republik Indonesia Armando G. Alvarez

foto: Naefurodji/hr

Indonesia-Meksiko Perlu Kerja Sama Pemulihan Pasca Bencana

Indonesia dan Meksiko secara geografis terletak di *ring of fire*, yang membuat kedua negara rentan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi serta gempa bumi. Karena alasan tersebut, kedua negara memandang perlu memperkuat kerja sama dalam pengembangan sistem peringatan dini serta pemulihan pasca bencana.

Demikian diungkapkan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) BKSAP DPR RI Indonesia-Meksiko Djoko Udjianto usai menerima Duta Besar Meksiko untuk Republik Indonesia Armando G. Alvarez di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

“Saya harapkan kerja sama diantara Indonesia-Meksiko ini bisa ditingkatkan, terutama di bidang penelitian dan teknologi. Sebab kita memiliki kendala alam yang sama, yaitu lempengan gempa, sehingga teknologi *early warning system* sangat bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Selain mitigasi bencana, politisi F-Demokrat ini juga menambahkan, hubungan bilateral Indonesia-Meksiko yang telah berusia 65 tahun memiliki banyak peluang untuk dikembangkan. Salah satunya adalah kerja sama ekonomi, walaupun memang terkendala jarak wilayah yang cukup jauh.

“Barangkali perlu juga kita pertimbangkan untuk menjual CPO (Crude Palm Oil), karena produksi CPO kita cukup banyak, walaupun mereka di-support Amerika Serikat dengan minyak bunga matahari dan minyak kedelai. Tapi, CPO salah satu alternatif bisa kita kerjasamakan,” sambungnya.

Dalam hal perdagangan, Djoko menuturkan, kunjungan GKSBB ke Meksiko 2016 silam juga membicarakan peluang impor daging sapi dari Meksiko ke Indonesia. Menurutnya, peluang ini harus diwujudkan sebagai peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara.

“Kerjasama ekonomi kita telah berkembang di banyak bidang. Total perdagangan kedua negara pada tahun 2017 telah mencapai USD 1,2 miliar dan kami yakin bahwa volume ini akan meningkat di tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya. ■ ann/sf

RUU POM Tak Akan Matikan Industri Kecil

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan, Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) tak akan mematikan industri kecil. Palsunya, hingga kini masih ada yang menganggap RUU ini akan mematikan industri kecil yang disinyalir melakukan hal yang ilegal. Oleh karena itu, sebelum tindakan akan ada pembinaan.



Foto:Rumi/hr

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi bersama Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho

“Maka dari itu, sebelum kita bicara penindakan, kita harus bicara pembinaan dengan menggandeng beberapa universitas ternama.

Jadi, RUU POM ini untuk mengawasi, membina dan bukan untuk menakut-nakuti,” kata Dede dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Hindari Makanan Bercacing, RUU POM Rampung Sebelum Ramadhan?’, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/4).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, berbagai isu yang sedang hangat di telinga publik dalam konteks obat dan makanan saat ini membuat adanya perhatian lebih untuk

mempercepat pembahasan RUU POM, agar jelas siapa yang memegang regulasi dan siapa yang mengoperasikan.

“Kita akan membelah RUU ini seperti UU Ketenagakerjaan dimana regulator itu adalah Kemenaker dan operator itu adalah BNP2TKI. Kemudian kita akan menentukan siapa yang harus kita pilah, siapa melakukan apa, dan fungsi pengawasannya ada dimana,” jelasnya.

Dede menambahkan, dengan adanya pembelahan yang dituangkan dalam RUU itu, agar tidak menciptakan badan yang *superbody*. Menurutnya, urgensi terhadap RUU itu sebagai fungsi pengawasan adalah peran-peran

badan terkait yang akan diambil dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan pembagian peran secara berimbang.

“Dalam proses penanganannya, jangan sampai BPOM mengambil peran Kementerian Kesehatan terkait obat yang harus melewati izin Kemenkes, karena belum tentu setiap obat harus lewat izin Kemenkes. Jadi menurut saya, harus ada pembagian peran,” imbuh Dede.

Di sisi lain, Dede juga meminta BPOM untuk tak sering menggelar konferensi pers. Apalagi temuannya hanya berdasarkan dugaan-dugaan terkait bahaya makanan, obat, kosmetik dan produk lainnya. “BPOM jangan sedikit-sedikit gelar konpers terhadap temuan atau bahaya makanan, obat, kosmetika yang baru diduga mengandung ini dan itu. Kalau temuannya sudah 100 persen ada bukti kuat, baru dirilis ke masyarakat,” tegas Dede.

Menurut politisi dapil Jawa Barat itu, memasuki perang dagang saat ini, dengan hanya diduga berbahaya atau mengandung bahan tertentu, maka akan ada produk kompetitor yang akan naik. “Sedangkan produk yang diduga tersebut langsung turun drastis, bahkan hilang di pasaran,” ujarnya.

Sebab saat ini kata Dede, propaganda apapun dengan menghalalkan segala cara akan dilakukan hanya untuk kepentingan dagang, dan itu berlaku global. Tugas BPOM itu untuk memastikan kesehatan sebuah produk makanan, minuman, kosmetika dan lain-lain. “Jadi, kalau BPOM belum ada bukti kebenarannya 100 persen, lebih baik tidak usah konpers,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Riant Nugroho mengatakan, jika perang dagang sekarang ini tidak dengan berhadapan dengan membawa senjata. Tapi, perang secara asimetris, yaitu dengan senjata kimia melalui produk makanan, obat, kosmetika, dan sebagainya.

Karena itu, menurutnya yang terpenting bagaimana RUU Pengawasan Obat dan Makanan ini membuat produk rakyat aman, semua pelaku usaha juga aman, serta memberdayakan usaha produk lokal. “Tugas RUU ini harus memberdayakan produk lokal,” ungkapnya. ■ tn/sf



75 Persen Pengguna Jasa Penyeberangan Baca Buletin dan Majalah Parleментарia

Manager Sumber Daya Manusia dan Umum PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Cabang Merak Christopher mengatakan, tak kurang dari 75 persen pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak memiliki minat baca yang sangat tinggi.



Tim Monitoring dan Evaluasi Buletin dan Majalah Parleментарia berdiskusi dengan Direksi PT. ASDP cabang Merak

Hal itu terlihat dari tiga rak penempatan Buletin dan Majalah Parleментарia yang selalu kosong, setelah sehari sebelumnya diisi penuh oleh produk kolaborasi Bagian Penerbitan dan Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI itu. Untuk itu, secara khusus Christopher meminta penambahan jumlah Buletin dan Majalah Parleментарia yang dikirim ke Pelabuhan Merak tiap minggunya.

“Kami menyimpulkan, tak kurang dari 75 persen pengguna jasa penyeberangan memiliki minat baca yang sangat tinggi,” terang Christopher saat menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi

Buletin dan Majalah Parleментарia, di Kantor ASDP Merak, Cilegon, Banten, Rabu (11/4).

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI sekaligus Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Distribusi Majalah dan Buletin Parleментарia, Sunardi, memastikan akan segera mengevaluasi permintaan penambahan jumlah tersebut.

“Salah satu tujuan adanya produk ini adalah agar DPR lebih dekat dengan masyarakat dan juga agar masyarakat luas mengetahui apa saja yang telah dan

akan dikerjakan oleh perwakilannya di Senayan,” terang Sunardi.

Pada kegiatan monitoring ke ASDP Merak ini, tim menemukan rak majalah yang kondisinya sudah seharusnya diganti. Sunardi berjanji akan sesegera mungkin menindaklanjutinya.

Kegiatan monitoring Majalah dan Buletin Parleментарia ke ASDP Merak juga diikuti sejumlah anggota, diantaranya Mediantoro, Eko Priyanto, Maria Dumaris Simanjuntak, Yudi Kresna, Barliansyah, Mustaqim dan Erman Suhendri. ■ es/sf



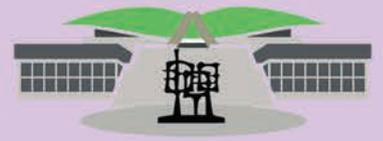
FESTIVAL & DISKUSI

Kopi, Teh dan Cokelat

PRODUK PETANI INDONESIA



GEDUNG DPR RI
25 - 27 APRIL 2018



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu sumpah peresmian dua Anggota DPR Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Slamet (dapil Jawa Barat IV) yang menggantikan Yudi Widiana Adia dan Aus Hidayat Nur (dapil Kalimantan Timur) menggantikan Hadi Mulyadi, Selasa (10/4). foto:Andri/rmi



Komisi VIII DPR dipimpin Wakil Ketua Ace Hasan Syadzilly menggelar RDPU dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (11/4). Foto: Arief/rmi



Seluruh Anggota Komisi XI menandatangani persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) ratifikasi protokol ke-6 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) untuk dilanjutkan pembahasannya ke Rapat Paripurna, Rabu (11/4). Foto: Jayadi/rmi